

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV di Kabupaten Jayapura

Minarni Marsuki^{1✉}, Elsyan R. Marlissa², Siti Rofingatun³, Adolf Z. D. Siahay⁴, Halomoan Hutajulu⁵, Juliana Waromi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kabupaten Jayapura. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 159 aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis data dilakukan menggunakan *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada triwulan IV dengan koefisien jalur sebesar 0,132 dan nilai ($p=0,045$). Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar 0,160 dan nilai ($p=0,019$). Sementara itu, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai (R^2) sebesar 0,064 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 6,4% variasi penyerapan anggaran pada triwulan IV. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan regulasi dan karakteristik individual aparatur. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat penjadwalan kegiatan, rencana penarikan dana, percepatan pengadaan, koordinasi antar-OPD, serta monitoring pelaksanaan anggaran agar realisasi belanja lebih merata sepanjang tahun.

Kata kunci: komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, regulasi, penyerapan anggaran.

Abstract

This study aims to analyze the effects of budget planning, budget implementation, regulations, human resource competency, and organizational commitment on the concentration of budget absorption in the fourth quarter in Jayapura Regency. The study employed a quantitative approach using a cross-sectional survey design. Data were collected through questionnaires administered to 159 government officials directly involved in budget management across 33 Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPDs). Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with WarpPLS 8.0 software. The results indicate that budget planning has a significant effect on fourth-quarter budget absorption, with a path coefficient of 0.132 ($p = 0.045$). Budget implementation also has a significant effect, with a path coefficient of 0.160 ($p = 0.019$). In contrast, regulations, human resource competency, and organizational commitment do not have significant effects. The coefficient of determination (R^2) is 0.064, indicating that the model explains only 6.4% of the variance in fourth-quarter budget absorption. These findings suggest that budget planning and implementation are more influential determinants of budget absorption than regulations and the individual characteristics of government personnel. Therefore, the Jayapura Regency Government should strengthen activity scheduling, cash disbursement planning, procurement acceleration, inter-OPD coordination, and budget implementation monitoring to achieve a more balanced distribution of expenditure realization throughout the fiscal year.

Keywords: budget absorption, budget implementation, budget planning, human resource competency, organizational commitment, regulations.

✉ Corresponding author :
Email Address : mi80nani@gmail.com

PENDAHULUAN

Anggaran publik tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besarnya realisasi pada akhir tahun, tetapi juga berdasarkan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaannya. Penyerapan anggaran yang berlangsung secara proporsional sepanjang tahun memungkinkan program pemerintah dilaksanakan sesuai jadwal, manfaat pelayanan publik diterima masyarakat lebih cepat, serta pengendalian dan pengawasan kegiatan dilakukan secara memadai. Sebaliknya, rendahnya realisasi pada awal tahun yang diikuti peningkatan secara tajam menjelang berakhirnya tahun anggaran menunjukkan adanya pola belanja yang tidak merata atau *back-loaded expenditure*. Kondisi tersebut dapat mencerminkan belum optimalnya kapasitas pemerintah dalam menerjemahkan anggaran menjadi program, kegiatan, dan keluaran pelayanan publik.

Konsentrasi pengeluaran menjelang akhir tahun merupakan persoalan pengelolaan anggaran yang ditemukan di berbagai negara. Berakhirnya masa berlaku anggaran dapat mendorong organisasi pemerintah mempercepat pengeluaran agar anggaran yang belum digunakan tidak dikurangi atau dikembalikan. Dorongan untuk menghabiskan sisa anggaran tersebut berpotensi menurunkan kualitas pemilihan program dan pengadaan. Liebman dan Mahoney (2017) menunjukkan bahwa lonjakan pengeluaran pada akhir tahun fiskal berkaitan dengan menurunnya kualitas sejumlah proyek pemerintah. Fenomena serupa ditemukan dalam pengadaan publik di negara-negara Eropa, yang menunjukkan bahwa lonjakan belanja akhir tahun bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan desain anggaran, insentif birokrasi, dan pengendalian pengeluaran (McCue et al., 2021). Penguatan pengawasan juga relevan karena ancaman audit terbukti dapat mengurangi belanja pengadaan pada akhir tahun yang diduga dilakukan hanya untuk menghabiskan anggaran (Engel et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan anggaran pemerintah juga menghadapi lingkungan kelembagaan yang kompleks. Ketatnya aturan, kekhawatiran terhadap risiko hukum, karakteristik kepemimpinan, dan besarnya belanja modal dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran secara tepat waktu (Rakhman, 2019). Ketidakpastian anggaran dan perubahan anggaran selama tahun berjalan juga dapat mendorong satuan kerja menunda pengeluaran pada awal periode dan mempercepatnya pada akhir tahun. Yalisman dan Khoirunurrofik (2025) menemukan bahwa revisi anggaran eksternal berhubungan dengan peningkatan lonjakan pengeluaran akhir tahun pada satuan kerja kementerian dan lembaga di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV merupakan hasil interaksi antara kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan, dinamika regulasi, kapasitas aparatur, dan perilaku organisasi.

Permasalahan tersebut juga terlihat pada pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan pengolahan data realisasi anggaran 33 OPD, rata-rata realisasi pada triwulan IV mencapai 35,26% dari pagu tahunan pada 2024 dan meningkat menjadi 35,42% pada 2025. Pada 2024, triwulan IV menjadi periode dengan realisasi tertinggi pada 25 dari 33 OPD atau sekitar 75,76%. Pada 2025, pola yang sama terjadi pada 21 OPD atau sekitar 63,64%. Sejumlah OPD bahkan merealisasikan lebih dari 50% anggaran tahunannya pada triwulan IV. Data tersebut memperlihatkan bahwa konsentrasi penyerapan

pada akhir tahun tidak hanya terjadi secara insidental pada satu perangkat daerah, tetapi telah menjadi pola yang relatif luas dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kondisi ini dapat mempersempit waktu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, meningkatkan tekanan administratif, serta mengurangi kesempatan untuk melakukan perbaikan ketika terjadi penyimpangan dari rencana.

Perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang diperkirakan menentukan pola penyerapan tersebut. Perencanaan yang berkualitas seharusnya memuat sasaran yang jelas, jadwal kegiatan yang realistis, indikator keluaran yang terukur, kebutuhan sumber daya, dan rencana pengadaan yang dapat dilaksanakan sejak awal tahun. Perencanaan yang tidak akurat dapat menyebabkan revisi anggaran, keterlambatan penetapan kegiatan, dan perubahan jadwal pelaksanaan. Astuti dan Fadjarenie (2024) serta Belisca et al. (2024) menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyerapan anggaran. Bandiyono dan Mayangsari (2021) juga menunjukkan bahwa kualitas perencanaan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi landasan operasional bagi ketepatan waktu pelaksanaan program.

Selain perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran menentukan kemampuan OPD dalam merealisasikan kegiatan sesuai jadwal. Pelaksanaan anggaran mencakup kesiapan dokumen, proses pencairan dana, pengadaan barang dan jasa, koordinasi antarunit, pelaksanaan kontrak, serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. Hambatan pada salah satu tahapan tersebut dapat menggeser kegiatan menuju akhir tahun. Kompetensi sumber daya manusia juga dibutuhkan karena aparatur pengelola anggaran harus memahami sistem, prosedur, aplikasi keuangan, ketentuan pengadaan, dan mekanisme pelaporan. Astuti dan Fadjarenie (2024) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja penyerapan anggaran. Belisca et al. (2024) juga menemukan pengaruh kompetensi aparatur terhadap penyerapan anggaran pada organisasi pemerintah daerah.

Regulasi dan komitmen organisasi turut membentuk lingkungan pelaksanaan anggaran. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian prosedural, sedangkan regulasi yang kompleks atau sering mengalami perubahan dapat memperpanjang proses penyesuaian administratif. Ramadhani dan Setiawan (2019) menemukan bahwa regulasi dan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, tetapi sumber daya manusia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Komitmen organisasi juga diperlukan untuk mendorong pimpinan dan pelaksana anggaran menempatkan pencapaian program sebagai tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, Ferdinan et al. (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dengan penyerapan anggaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen formal terhadap organisasi belum tentu dapat mengatasi hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan anggaran.

Temuan penelitian terdahulu dengan demikian belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Astuti & Fadjarenie, 2024; Belisca et al., 2024), sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa hanya kualitas perencanaan yang berpengaruh signifikan, sementara kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh (Bandiyono & Mayangsari, 2021). Ramadhani dan Setiawan (2019) menemukan bahwa regulasi

dan perencanaan berpengaruh, tetapi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Sementara itu, Ferdinan et al. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh sebagaimana yang diperkirakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh setiap faktor sangat mungkin bergantung pada karakteristik organisasi, sistem administrasi, lingkungan kelembagaan, dan konteks pemerintah daerah yang diteliti.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran di Indonesia juga lebih banyak menilai besarnya penyerapan secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Kajian yang secara khusus menempatkan konsentrasi penyerapan pada triwulan IV sebagai permasalahan utama masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dalam satu model pengujian pada pemerintah kabupaten di wilayah Papua belum banyak ditemukan. Padahal, data Kabupaten Jayapura memperlihatkan bahwa tingginya realisasi pada triwulan IV merupakan pola yang terjadi pada sebagian besar OPD selama dua tahun anggaran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kabupaten Jayapura. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV sebagai fokus analisis, penggunaan model yang mengintegrasikan lima determinan pengelolaan anggaran, serta pemilihan pemerintah daerah di Papua sebagai konteks empiris. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian mengenai ketepatan waktu pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kapasitas aparatur, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat koordinasi agar realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori keagenan, teori implementasi kebijakan, dan perspektif *good governance*. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik. Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan biaya keagenan serta mengurangi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah sebagai agen dituntut merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara efektif kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik (Jensen & Meckling, 1976).

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, tingkat konflik, sumber daya pelaksana, koordinasi, serta lingkungan organisasi. Kebijakan yang memiliki tingkat ambiguitas tinggi berpotensi menghasilkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan anggaran, ketidakjelasan program, perubahan prosedur, keterbatasan kompetensi aparatur, dan lemahnya koordinasi dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan serta menggeser realisasi anggaran ke triwulan IV (Matland, 1995).

Perspektif *good governance* melengkapi kedua teori tersebut dengan menekankan efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya persentase realisasi,

tetapi juga oleh ketepatan waktu, efisiensi, transparansi, dan kesesuaian belanja dengan tujuan pelayanan publik (Kaufmann et al., 2011). Dengan demikian, ketiga perspektif tersebut dapat menjelaskan hubungan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dengan penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan organisasi pemerintah merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode anggaran. Dalam penelitian ini, tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV merujuk pada besarnya realisasi anggaran yang terkonsentrasi menjelang berakhirnya tahun anggaran. Pola tersebut dikenal sebagai *year-end spending spike* atau *back-loaded expenditure*, yaitu rendahnya realisasi pada awal tahun yang diikuti peningkatan tajam pada akhir tahun.

Konsentrasi pengeluaran pada akhir tahun tidak selalu mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Liebman dan Mahoney (2017) menunjukkan bahwa dorongan menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun dapat menurunkan kualitas sejumlah pengadaan pemerintah. Rausch dan Wall (2015) juga menjelaskan bahwa batas waktu anggaran dan mekanisme pengendalian yang tidak tepat dapat menciptakan perilaku belanja yang tidak efisien. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh ketatnya aturan, risiko hukum, kepemimpinan, dan karakteristik belanja pemerintah daerah (Rakhman, 2019). Oleh karena itu, penyerapan yang terkonsentrasi pada triwulan IV perlu dilihat sebagai persoalan ketepatan waktu dan kualitas pengelolaan anggaran, bukan hanya besarnya realisasi.

Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan proses penetapan program, target, kebutuhan sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan alokasi dana untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang berkualitas menghasilkan kegiatan yang realistis, indikator kinerja yang terukur, serta rencana penarikan dana yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Sebaliknya, perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan revisi anggaran, perubahan jadwal kegiatan, keterlambatan pengadaan, dan penundaan pencairan dana.

Bandiyono dan Mayangsari (2021) menunjukkan bahwa kualitas perencanaan merupakan faktor yang berhubungan dengan kinerja penyerapan anggaran. Temuan serupa disampaikan oleh Astuti dan Fadjarenie (2024) serta Belisca et al. (2024), yang menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja penyerapan anggaran. Ramadhani dan Setiawan (2019) juga menemukan bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas perencanaan diperkirakan menentukan kemampuan OPD merealisasikan anggaran sesuai jadwal dan mencegah konsentrasi realisasi pada akhir tahun.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan menerjemahkan rencana anggaran menjadi program dan kegiatan. Tahapan ini meliputi penyiapan dokumen, pencairan dana, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pembayaran, serta penyelesaian pertanggungjawaban. Pelaksanaan yang berjalan sesuai jadwal akan menghasilkan distribusi realisasi yang lebih

merata sepanjang tahun. Sebaliknya, keterlambatan administrasi dan teknis dapat menyebabkan sebagian besar kegiatan baru direalisasikan pada triwulan IV.

Rakhman (2019) menjelaskan bahwa implementasi anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh risiko yang dirasakan pelaksana, ketatnya aturan, karakteristik pimpinan, dan komposisi belanja. Astuti dan Fadjarenie (2024) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja penyerapan anggaran. Ferdinan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara bersama-sama berkaitan dengan penyerapan anggaran. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, kesiapan pelaksana dan koordinasi antarunit menjadi syarat agar kegiatan tidak tertunda sampai akhir tahun.

H2: Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Regulasi dan Penyerapan Anggaran

Regulasi merupakan seperangkat ketentuan yang mengarahkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengadaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian prosedural bagi aparatur. Sebaliknya, peraturan yang kompleks, sering berubah, atau sulit dipahami dapat meningkatkan kehati-hatian berlebihan dan memperpanjang proses administratif.

Ramadhani dan Setiawan (2019) menemukan bahwa regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada OPD. Rakhman (2019) juga menunjukkan bahwa lingkungan dengan ketentuan yang ketat dan risiko hukum yang tinggi dapat memengaruhi perilaku aparatur dalam melaksanakan anggaran. Dalam kondisi tersebut, aparatur dapat memilih menunda keputusan sampai memperoleh kepastian administratif. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana berpotensi terkonsentrasi pada triwulan IV.

H3: Regulasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran

Kompetensi sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Model kompetensi yang baik perlu dikaitkan dengan konteks organisasi dan tugas yang dijalankan agar dapat mendukung pencapaian kinerja (Campion et al., 2011). Dalam pengelolaan anggaran, aparatur memerlukan pemahaman mengenai perencanaan, sistem keuangan, pengadaan, regulasi, aplikasi administrasi, dan pertanggungjawaban belanja.

Hasil penelitian mengenai kompetensi aparatur belum sepenuhnya konsisten. Astuti dan Fadjarenie (2024) serta Belisca et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun, Ramadhani dan Setiawan (2019) menemukan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mungkin baru memberikan dampak ketika didukung oleh pembagian tugas, sistem kerja, koordinasi, dan kewenangan yang memadai. Inkonsistensi temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji kembali pengaruh kompetensi aparatur dalam konteks Kabupaten Jayapura.

H4: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Komitmen Organisasi dan Penyerapan Anggaran

Komitmen organisasi menggambarkan keterikatan psikologis pegawai terhadap organisasi, yang dapat berbentuk keinginan untuk tetap menjadi bagian organisasi,

pertimbangan atas konsekuensi meninggalkan organisasi, dan kewajiban moral untuk mempertahankan keanggotaannya (Meyer & Allen, 1991). Dalam organisasi pemerintah, komitmen dapat terlihat dari kesediaan aparatur mencapai target, menyelesaikan kegiatan tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap hasil pengelolaan anggaran.

Aparatur dengan komitmen tinggi diperkirakan lebih aktif menyelesaikan hambatan administratif, meningkatkan koordinasi, dan menjaga pencapaian target organisasi. Meskipun demikian, Ferdinan et al. (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat hubungan perencanaan dan pelaksanaan dengan penyerapan anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen saja belum tentu mampu mengatasi kendala struktural, regulatif, dan teknis. Oleh sebab itu, pengaruh langsung komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran masih perlu diuji.

H5: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada triwulan IV.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori dan pengambilan data secara *cross-sectional*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap tingkat konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV. Penelitian dilaksanakan pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya pola realisasi anggaran yang cenderung meningkat pada akhir tahun anggaran.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian terdiri atas 264 aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada 33 OPD di Kabupaten Jayapura. Aparatur tersebut meliputi Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga diperoleh 159 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Setiap OPD diperlakukan sebagai strata, sedangkan jumlah responden pada setiap OPD ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah aparatur pengelola anggarannya.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 33 OPD di Kabupaten Jayapura selama kurang lebih satu bulan. Responden dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu 1 untuk "sangat tidak setuju", 2 untuk "tidak setuju", 3 untuk "netral", 4 untuk "setuju", dan 5 untuk "sangat setuju". Pengumpulan data dilakukan dengan pendampingan peneliti untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pengisian tanpa mengarahkan jawaban responden.

Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian terdiri atas 41 pernyataan yang mengukur enam konstruk. Indikator dikembangkan dengan mengadaptasi penelitian terdahulu dan menyesuaikannya dengan konteks pengelolaan anggaran OPD di Kabupaten Jayapura. Seluruh konstruk diperlakukan sebagai konstruk reflektif karena indikator digunakan untuk merepresentasikan kondisi konstruk yang diukur.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sumber adaptasi
Perencanaan anggaran (X1)	Kualitas proses penyusunan kebutuhan, program, kegiatan, prioritas, dan dokumen anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan.	7	Nugroho dan Alfarisi (2017)
Pelaksanaan anggaran (X2)	Kemampuan OPD merealisasikan program, kegiatan, pencairan anggaran, dan target sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	7	Zulaikah dan Burhany (2019)
Regulasi (X3)	Tingkat kejelasan, konsistensi, kemudahan pemahaman, dan dukungan peraturan terhadap pelaksanaan anggaran.	6	Ramadhani dan Setiawan (2019)
Kompetensi sumber daya manusia (X4)	Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan teknis, dan pemahaman aparatur terhadap pengelolaan anggaran.	8	Belisca et al. (2024)
Komitmen organisasi (X5)	Kesungguhan, tanggung jawab, kedisiplinan, loyalitas, dan kesediaan aparatur untuk mencapai target organisasi.	6	Diko et al. (2023)
Konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV (Y)	Kondisi ketika realisasi anggaran tidak terdistribusi secara merata dan sebagian besar pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun.	7	Nugroho dan Alfarisi (2017); Zulaikah dan Burhany (2019)

Perencanaan anggaran diukur melalui kesesuaian kebutuhan anggaran, ketepatan penyusunan, kejelasan program dan kegiatan, kelengkapan dokumen, koordinasi penyusunan, penetapan prioritas, dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Pelaksanaan anggaran diukur melalui ketepatan waktu kegiatan, kesesuaian realisasi, kelancaran pencairan, minimnya keterlambatan, efektivitas dan efisiensi program, kemampuan mengatasi hambatan, serta ketercapaian target.

Regulasi diukur melalui kemudahan memahami peraturan, konsistensi penerapan, dukungan regulasi, frekuensi perubahan, stabilitas kebijakan, dan kejelasan aturan. Kompetensi sumber daya manusia diukur melalui kesesuaian pendidikan, keikutsertaan dalam pelatihan, pemahaman tugas, pengalaman, kemampuan teknis, kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman regulasi keuangan.

Komitmen organisasi diukur melalui loyalitas, tanggung jawab, ketepatan penyelesaian tugas, kedisiplinan, komitmen mencapai target, dan kesediaan memberikan usaha tambahan. Variabel dependen diukur melalui rendahnya penyerapan pada awal tahun, peningkatan realisasi pada akhir tahun, pelaksanaan kegiatan mendekati akhir tahun, ketidaksesuaian

realisasi dengan jadwal, konsentrasi realisasi pada triwulan IV, keterlambatan kegiatan, dan ketidakmerataan penyerapan anggaran. Skor yang lebih tinggi pada variabel dependen menunjukkan konsentrasi penyerapan anggaran yang semakin kuat pada triwulan IV.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak WarpPLS versi 8.0. PLS-SEM dipilih karena penelitian melibatkan beberapa konstruk laten dengan banyak indikator dan bertujuan menjelaskan serta memprediksi hubungan antarkonstruk secara simultan (Hair et al., 2019). Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran dan model struktural.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai *outer loading* dan *average variance extracted* (AVE). Indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki *outer loading* sekurang-kurangnya 0,70 dan nilai AVE konstruk lebih besar dari 0,50. Indikator dengan nilai *loading* antara 0,40 dan 0,70 dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan apabila penghapusannya tidak meningkatkan AVE dan reliabilitas komposit secara substantif (Hair et al., 2019).

Reliabilitas konstruk dinilai menggunakan Cronbach's alpha dan *composite reliability*. Konstruk dinyatakan reliabel apabila kedua ukuran tersebut bernilai sekurang-kurangnya 0,70. Nilai reliabilitas yang terlalu tinggi, yaitu melebihi 0,95, perlu diperiksa karena dapat menunjukkan adanya kemiripan atau pengulangan isi antarindikator.

Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan rasio *heterotrait-monotrait* (HTMT). Konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan apabila nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah 0,90 (Henseler et al., 2015). Pemeriksaan *cross-loading* dan akar kuadrat AVE dapat digunakan sebagai analisis pendukung.

Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural diawali dengan pemeriksaan kolinearitas antarkonstruk melalui nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF di bawah 5 menunjukkan tidak terdapat masalah kolinearitas yang serius, sedangkan nilai di bawah 3,3 menunjukkan tingkat kolinearitas yang lebih ideal.

Kemampuan penjelasan model dinilai menggunakan koefisien determinasi (R^2), sedangkan relevansi prediktif dinilai melalui nilai (Q^2). Nilai (Q^2) yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa model mempunyai relevansi prediktif. Besarnya kontribusi masing-masing variabel independen juga dapat dinilai menggunakan ukuran efek (f^2).

Kesesuaian model WarpPLS dievaluasi melalui *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), *average adjusted R-squared* (AARS), *average block VIF* (AVIF), dan *average full collinearity VIF* (AFVIF). Model dinyatakan memenuhi kriteria apabila APC, ARS, dan AARS memiliki nilai ($p < 0,05$), serta AVIF dan AFVIF tidak melebihi 5; nilai tidak lebih dari 3,3 menunjukkan kesesuaian yang ideal (Kock, 2025).

Karena seluruh data konstruk diperoleh dari responden dan instrumen yang sama, potensi *common method bias* diperiksa melalui pendekatan *full collinearity*. Model dinyatakan tidak menunjukkan indikasi kuat *common method bias* apabila nilai *full collinearity VIF* pada setiap konstruk tidak melebihi 3,3 (Kock, 2015).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis diuji berdasarkan nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas yang diperoleh melalui prosedur *resampling*. Hipotesis penelitian diterima apabila nilai ($p < 0,05$). Koefisien jalur menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap tingkat konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Kuesioner

Penelitian dilaksanakan pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura. Sebanyak 264 kuesioner disebarikan kepada aparatur pengelola anggaran dan 159 kuesioner dikembalikan serta dapat diolah. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner mencapai 60,23%.

Tabel 2. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarikan	264
Kuesioner yang dikembalikan	159
Kuesioner yang dapat diolah	159
Tingkat pengembalian	60,23%

Sumber: Data diolah, 2026.

Karakteristik Responden

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, dengan responden perempuan sebesar 50,94% dan laki-laki sebesar 49,06%. Sebagian besar responden berusia 41–50 tahun, berpendidikan sarjana, dan menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kegiatan serta anggaran OPD.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	78	49,06%
	Perempuan	81	50,94%
Usia	20–30 tahun	9	5,66%
	31–40 tahun	38	23,90%
	41–50 tahun	65	40,88%
	≥51 tahun	47	29,56%
Pendidikan	SMA	1	0,63%
	Diploma III	5	3,14%
	Sarjana	133	83,65%
	Magister	20	12,58%
Jabatan	Pengguna Anggaran	4	2,52%
	PPTK	105	66,04%
	PPK	22	13,84%
	Bendahara Pengeluaran	28	17,61%

Sumber: Data diolah, 2026.

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memperoleh nilai rata-rata di atas 3,80. Perencanaan anggaran memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 4,26, sedangkan konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV memiliki rata-rata 3,85. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa responden mengakui masih terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata	Item tertinggi	Nilai	Item terendah	Nilai	Kategori
Perencanaan anggaran	4,26	PRA3	4,39	PRA7	4,11	Sangat tinggi
Pelaksanaan anggaran	3,92	PLA5	4,03	PLA3	3,77	Tinggi
Regulasi	4,02	REG6	4,20	REG5	3,93	Tinggi
Kompetensi SDM	4,02	KOM3	4,08	KOM2	3,98	Tinggi
Komitmen organisasi	4,12	KO5	4,22	KO6	4,03	Tinggi
Konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	3,85	PA1	4,12	PA4	3,71	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2026.

Tingginya rata-rata perencanaan, kompetensi, regulasi, dan komitmen organisasi menunjukkan bahwa aparatur menilai aspek-aspek administratif tersebut telah berjalan relatif baik. Namun, rata-rata variabel dependen yang juga tinggi mengindikasikan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Nilai *loading factor* indikator berada pada rentang 0,603–0,884, sedangkan seluruh konstruk memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0,50. Beberapa indikator dengan nilai *loading* antara 0,60 dan 0,70 tetap dapat diterima karena nilai AVE dan reliabilitas komposit setiap konstruk telah memenuhi kriteria. Pedoman PLS-SEM menekankan bahwa evaluasi indikator perlu mempertimbangkan *loading*, AVE, dan reliabilitas secara bersamaan, bukan berdasarkan satu ukuran secara terpisah (Hair et al., 2019).

Tabel 5. Hasil Evaluasi Model Pengukuran

Variabel	Rentang <i>loading</i>	AVE	Cronbach's alpha	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
Perencanaan anggaran	0,662–0,772	0,536	0,855	0,889	Valid dan reliabel
Pelaksanaan anggaran	0,670–0,845	0,591	0,884	0,910	Valid dan reliabel
Regulasi	0,608–0,826	0,543	0,829	0,876	Valid dan reliabel
Kompetensi SDM	0,702–0,853	0,635	0,917	0,933	Valid dan reliabel
Komitmen organisasi	0,717–0,884	0,678	0,904	0,926	Valid dan reliabel
Konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	0,603–0,865	0,572	0,872	0,902	Valid dan reliabel

Sumber: Data diolah, 2026.

Nilai Cronbach's alpha dan *composite reliability* seluruh konstruk berada di atas 0,70 sehingga instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Hasil matriks korelasi antarkonstruk dan akar kuadrat AVE juga menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Oleh karena itu, instrumen dinilai memadai untuk pengujian model struktural.

Evaluasi Model Struktural

Nilai (R^2) variabel konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV sebesar 0,064, sedangkan *adjusted* (R^2) sebesar 0,034. Artinya, kelima variabel independen hanya menjelaskan

6,4% variasi variabel dependen, sementara 93,6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai (Q^2) sebesar 0,115 menunjukkan bahwa model tetap memiliki relevansi prediktif karena bernilai lebih besar dari nol.

Tabel 6. Model Fit and Quality Indices

Indikator	Nilai	Nilai probabilitas/kriteria	Kesimpulan
<i>Average path coefficient</i> (APC)	0,098	(p=0,052)	Belum memenuhi
<i>Average R-squared</i> (ARS)	0,064	(p=0,103)	Belum memenuhi
<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	0,034	(p=0,167)	Belum memenuhi
<i>Average block VIF</i> (AVIF)	1,614	$\leq 3,3$ ideal	Memenuhi
<i>Average full collinearity VIF</i> (AFVIF)	1,891	$\leq 3,3$ ideal	Memenuhi
Tenenhaus GoF	0,195	$\geq 0,10$	Kategori kecil
<i>Simpson's paradox ratio</i> (SPR)	0,800	$\geq 0,70$	Memenuhi
<i>R-squared contribution ratio</i> (RSCR)	0,825	$\geq 0,90$	Belum memenuhi
<i>Statistical suppression ratio</i> (SSR)	1,000	$\geq 0,70$	Memenuhi
<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio</i> (NLBCDR)	1,000	$\geq 0,70$	Memenuhi

Sumber: Data diolah, 2026.

Nilai AVIF dan AFVIF menunjukkan bahwa model tidak menghadapi masalah kolinearitas. Meskipun demikian, nilai APC, ARS, AARS, RSCR, dan GoF memperlihatkan bahwa kemampuan penjelasan dan kesesuaian model masih relatif rendah. Oleh karena itu, hasil pengujian jalur perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak digeneralisasikan di luar konteks OPD Kabupaten Jayapura tanpa penelitian lanjutan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan koefisien jalur dan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan antarvariabel	Koefisien jalur	Nilai (p)	Keputusan
H1	Perencanaan anggaran → konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	0,132	0,045	Diterima
H2	Pelaksanaan anggaran → konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	0,160	0,019	Diterima
H3	Regulasi → konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	-0,022	0,388	Ditolak
H4	Kompetensi SDM → konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	0,094	0,113	Ditolak
H5	Komitmen organisasi → konsentrasi penyerapan anggaran triwulan IV	-0,081	0,150	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2026.

Karena indikator variabel dependen mengukur rendahnya realisasi pada awal tahun, keterlambatan kegiatan, dan meningkatnya realisasi pada triwulan IV, koefisien positif harus dibaca sebagai peningkatan kecenderungan konsentrasi penyerapan pada akhir tahun. Koefisien positif tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kualitas penyerapan menjadi semakin baik.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Konsentrasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV dengan koefisien 0,132 dan ($p=0,045$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dinilai baik oleh aparatur belum otomatis menghasilkan realisasi anggaran yang merata sepanjang tahun. Dokumen perencanaan dapat tersusun dengan lengkap, tetapi jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan, dan rencana penarikan dana masih mungkin diarahkan pada semester kedua atau akhir tahun.

Signifikansi pengaruh perencanaan sejalan dengan Astuti dan Fadjarenie (2024), yang menemukan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja penyerapan anggaran. Ferdinan et al. (2020) juga menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun, dalam penelitian ini variabel dependen menekankan konsentrasi pada triwulan IV. Oleh sebab itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas dokumen perencanaan perlu diikuti dengan penjadwalan kegiatan yang lebih realistis, penyusunan rencana penarikan dana per bulan, dan pelaksanaan pengadaan sejak awal tahun.

Temuan ini juga dapat menjelaskan mengapa perencanaan yang secara administratif dinilai baik tetap berjalan berdampingan dengan pola *back-loaded expenditure*. Liebman dan Mahoney (2017) menunjukkan bahwa batas akhir tahun anggaran dapat menciptakan insentif untuk mempercepat belanja pada akhir periode, bahkan ketika perencanaan formal telah tersedia. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu menilai kualitas perencanaan bukan hanya dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari distribusi jadwal pelaksanaan dan realisasi antartriwulan.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Konsentrasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV dengan koefisien 0,160 dan ($p=0,019$). Pelaksanaan anggaran merupakan variabel dengan koefisien jalur terbesar dalam model. Hasil ini menunjukkan bahwa pola realisasi akhir tahun sangat berkaitan dengan waktu dimulainya kegiatan, penyelesaian administrasi, pencairan dana, pelaksanaan kontrak, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Temuan tersebut sejalan dengan Astuti dan Fadjarenie (2024), yang menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyerapan. Namun, Ferdinan et al. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan, sehingga memperlihatkan bahwa pengaruh pelaksanaan dapat berbeda menurut karakteristik organisasi dan hambatan yang dihadapi.

Dalam konteks Kabupaten Jayapura, koefisien positif mengindikasikan bahwa kegiatan memang dapat dilaksanakan dan anggaran dapat direalisasikan, tetapi pelaksanaannya masih lebih banyak terjadi menjelang akhir tahun. Penelitian Negara et al. (2018) menunjukkan bahwa kebijakan, administrasi, dan kapasitas sumber daya manusia dapat menyebabkan rendahnya realisasi pada awal tahun dan penumpukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada percepatan penetapan pejabat pengelola anggaran, pengadaan dini, penyelesaian dokumen kontrak, dan pemantauan deviasi jadwal secara berkala.

Pengaruh Regulasi terhadap Konsentrasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV, dengan koefisien $-0,022$ dan ($p=0,388$). Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan persepsi mengenai kejelasan, konsistensi, dan kemudahan memahami regulasi tidak mampu menjelaskan variasi konsentrasi realisasi anggaran antarresponden.

Tidak signifikannya regulasi dapat terjadi karena ketentuan pengelolaan keuangan daerah berlaku relatif seragam bagi seluruh OPD. Aparatur juga telah terbiasa menggunakan regulasi yang sama sehingga variasi persepsinya menjadi rendah. Kendala penyerapan

kemungkinan lebih banyak terjadi pada penerjemahan regulasi ke dalam prosedur administrasi, verifikasi, pengadaan, dan pencairan dana daripada pada substansi peraturannya.

Hasil ini berbeda dengan Lannai dan Amin (2020), yang menemukan bahwa regulasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa regulasi dapat menjadi determinan penting pada daerah tertentu, tetapi tidak selalu menjadi pembeda ketika aparatur telah memiliki pemahaman yang relatif seragam. Rakhman (2019) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dalam lingkungan aturan yang ketat dipengaruhi oleh karakteristik kepemimpinan dan struktur belanja, bukan hanya keberadaan regulasi.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Konsentrasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV, dengan koefisien 0,094 dan ($p=0,113$). Mayoritas responden memiliki pendidikan sarjana atau magister serta menduduki jabatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan kompetensi responden relatif homogen dan kurang mampu menjelaskan perbedaan pola penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kristianingsih et al. (2022), yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran pada perguruan tinggi negeri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen anggaran lebih menentukan dibandingkan kapasitas individu ketika sistem organisasi belum bekerja secara optimal.

Sebaliknya, Astuti dan Fadjarenie (2024) serta Lannai dan Amin (2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi baru menghasilkan dampak yang lebih kuat ketika aparatur memiliki kewenangan, dukungan sistem, koordinasi, dan prosedur kerja yang memungkinkan kompetensinya diterapkan. Oleh karena itu, pelatihan aparatur perlu disertai penyederhanaan alur kerja dan kejelasan pembagian kewenangan.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Konsentrasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV, dengan koefisien $-0,081$ dan ($p=0,150$). Nilai rata-rata komitmen organisasi sebesar 4,12 menunjukkan bahwa loyalitas, tanggung jawab, kedisiplinan, dan orientasi pencapaian target aparatur telah dinilai tinggi. Namun, tingginya komitmen individu belum mampu mengatasi kendala yang memerlukan keterlibatan beberapa unit dan pejabat secara bersamaan.

Temuan ini sejalan dengan Kristianingsih et al. (2022), yang menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas penyerapan anggaran. Periansya et al. (2022) juga menemukan bahwa komitmen pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan tidak mampu memediasi pengaruh perencanaan maupun kualitas aparatur. Selain itu, Ferdinan et al. (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan penyerapan anggaran.

Hasil tersebut menegaskan bahwa komitmen aparatur harus didukung oleh sistem pengendalian, koordinasi, kepastian jadwal, dan kewenangan pengambilan keputusan. Seorang PPTK atau bendahara yang berkomitmen tinggi tetap tidak dapat mempercepat realisasi apabila dokumen pengadaan belum selesai, persetujuan pejabat tertunda, atau kegiatan bergantung pada unit kerja lain.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kabupaten Jayapura. Sementara itu, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pola penyerapan anggaran pada akhir tahun terutama berkaitan dengan kualitas penyusunan rencana dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, upaya mengurangi konsentrasi realisasi pada triwulan IV perlu diarahkan pada penyusunan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana yang lebih realistis, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan mekanisme pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Penelitian ini hanya melibatkan 159 aparatur pengelola anggaran pada 33 OPD di Kabupaten Jayapura sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah. Data yang digunakan juga bersifat persepsional dan dikumpulkan melalui kuesioner pada satu periode, sehingga masih berpotensi dipengaruhi subjektivitas responden dan belum menggambarkan perubahan pola penyerapan anggaran dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian hanya menguji lima variabel dan menghasilkan nilai (R^2) sebesar 0,064, yang berarti model hanya mampu menjelaskan 6,4% variasi konsentrasi penyerapan anggaran pada triwulan IV. Dengan demikian, sebagian besar variasi masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi anggaran lebih ditentukan oleh kesiapan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan daripada hanya oleh regulasi dan karakteristik individu aparatur. Temuan ini menunjukkan bahwa konsentrasi penyerapan anggaran pada akhir tahun merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan proses, struktur organisasi, dan mekanisme implementasi anggaran. Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memprioritaskan peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antar-OPD, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan efektivitas monitoring dan pengendalian internal agar realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

Pemerintah Kabupaten Jayapura disarankan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran sejak awal tahun agar keterlambatan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Jadwal pengadaan barang dan jasa perlu disusun lebih realistis dan dilaksanakan lebih awal, disertai penguatan kapasitas UKPBJ serta optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Koordinasi antara BPKAD, OPD teknis, unit perencanaan, dan bagian pengadaan juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran. Peningkatan kompetensi aparatur sebaiknya disertai pembenahan pembagian tugas, kewenangan, sistem pengendalian, dan prosedur kerja agar kemampuan serta komitmen pegawai dapat diterjemahkan menjadi kinerja anggaran yang lebih baik.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas serta mengombinasikan data persepsi dengan data realisasi anggaran antartiwulan. Model penelitian juga dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor pengadaan barang dan jasa, sistem pengendalian internal, kepemimpinan, koordinasi antarorganisasi, teknologi informasi, perubahan anggaran, kondisi geografis, dan kapasitas fiskal daerah agar kemampuan model dalam menjelaskan konsentrasi penyerapan anggaran menjadi lebih kuat.

Referensi :

- Astuti, E. Y., & Fadjarenie, R. A. (2024). The influence of budget planning, human resource competence, and budget implementation on budget absorption performance. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 248–262. <https://doi.org/10.29210/020244062>
- Bandiyono, A., & Mayangsari, S. (2021). The role of cash planning in budget absorption: Perception testing. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 201–221. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.806>
- Belisca, A., Azmi, Z., & Sari, D. (2024). Regional organizational budget absorption: The role of budget planning, human resource competence and procurement of goods and services. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 4(2), 116–127. <https://doi.org/10.54951/ijtar.v4i2.547>
- Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. *Personnel Psychology*, 64(1), 225–262. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2010.01207.x>
- Diko, N. A. R., Hiola, Y., & Radjak, L. I. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 497–503. <https://doi.org/10.37479/jimb.v6i1.20135>
- Engel, E., Jordán, F., Rau, T., & Repetto, A. (2023). Audit threats and year-end spending by government agencies: Experimental evidence from Chile. *Journal of Public Procurement*, 23(1), 100–124. <https://doi.org/10.1108/IOPP-07-2022-0032>
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of e-Collaboration*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101>
- Kock, N. (2025). *WarpPLS user manual: Version 8.0*. ScriptWarp Systems.
- Kristianingsih, E., Wahyudin, A., & Sukirman, S. (2022). Determinan kualitas penyerapan anggaran belanja dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi: Studi empiris pada perguruan tinggi negeri Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 90–107. <https://doi.org/10.15294/beaj.v2i2.37786>
- Lannai, D., & Amin, A. (2020). Factors affect budget absorption in government institutions of South Sulawesi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v3i2.255>
- Liebman, J. B., & Mahoney, N. (2017). Do expiring budgets lead to wasteful year-end spending? Evidence from federal procurement. *American Economic Review*, 107(11), 3510–3549. <https://doi.org/10.1257/aer.20131296>

- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- McCue, C. P., Prier, E., & Lofaro, R. J. (2021). Examining year-end spending spikes in the European Economic Area: A comparative study of procurement contracts. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(5), 513–532. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2020-0186>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61–89. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)
- Negara, P. K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi kasus fenomena tingkat serapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 19(1), 76–91. <https://doi.org/10.18196/jai.190193>
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi melonjaknya penyerapan anggaran kuartal IV instansi pemerintah: Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 22–37.
- Periansya, P., Nurhidayati, N., & Mubarak, M. H. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas aparatur terhadap penyerapan anggaran dengan perantara komitmen pimpinan. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 526–542. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.986>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: Evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Rausch, A., & Wall, F. (2015). Mitigating inefficiencies in budget spending: Evidence from an explorative study. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 11(4), 430–454. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2013-0035>
- Yalisman, F., & Khoirunurrofik, K. (2025). Risk aversion and budget uncertainty: Empirical evidence on year-end government spending spikes in Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 10(2), 157–172. <https://doi.org/10.33105/itrev.v10i2.1227>
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. *Proceedings of Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221–1234.